



Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (ketiga kiri) dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo (kiri) meninjau irigasi lahan pertanian di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (27/6/2020). Peninjauan menteri tersebut terkait rehabilitasi saluran irigasi di lahan pertanian di daerah itu yang rencananya pemerintah akan menjadikannya sebagai lahan pertanian untuk program pengembangan ketahanan pangan nasional baru atau 'Food Estate' di Provinsi Kalimantan Tengah.

KENDALIKAN COVID-19

Gubernur Khofifah Bentuk Tim Gabungan di Surabaya Raya

Oleh Imam Suhartadi

► SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, akan membentuk Tim Gabungan Forkopimda Jatim dan Gugus Tugas penanganan Covid-19 wilayah Surabaya Raya. Upaya tersebut dilakukan, untuk mengendalikan angka penularan virus corona.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi pengarahannya di Gedung Negara Graha Surabaya, Kamis (25/6), memberi batas waktu dua pekan, untuk menurunkan angka positif virus corona di Jawa Timur, terutama di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik). "Seuai arahan pak Presiden bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya akan bisa dilakukan *sharing* sumber daya dan komitmen yang terukur," kata Khofifah di Surabaya, Minggu (28/6).

Menurut mantan menteri sosial ini, *action plan* selanjutnya, yaitu dengan terus memastikan tes, pelacakan, isolasi hingga *treatment* dengan jumlah yang lebih banyak.

Salah satunya yaitu dengan menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinkes lokal khususnya di kluster utama Surabaya Raya, untuk melakukan testing dan isolasi masif.

Kemudian *tracing* minimal 20 orang per kasus positif. Selain itu, penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman, dalam hal ini keberadaan RS Darurat bisa dioptimalkan.

"Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringa harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu *update* dengan para pakar," ungkapnya.

Saat ini, dikatakan, mesin PCR yang ada di Jawa Timur kapasitas totalnya 2.250 tes/hari dan dalam seminggu tesnya mencapai 13.500 spesimen. Minggu ini rencananya akan dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin PCR serta reagen sesuai kebutuhan.

Terkait prakondisi memasuki *new normal* maka pihaknya akan melakukan koordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten kota untuk mempertimbangkan agar sementara tetap menutup dulu aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor dan melakukan monitor ketat. Termasuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di pasar di Surabaya Raya.

Di samping itu, juga membuat zonasi tiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemiologi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.

Ia menambahkan, untuk meluaskan sosialisasi protokol kese-



Khofifah Indar Parawansa

hatan kepada masyarakat pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, *influencer*, dan pelaku usaha dan elemen strategis lainnya. Utamanya terkait pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.

Sistem dukungan dan insentif juga perlu disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker.

"Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker maka *Rate of Transmission* (RT) bisa di bawah satu dan kurva bisa turun," ujarnya.

Kasus Covid-19

Penambahan harian kasus pasien sembuh dari Covid-19 mencatatkan rekor terbaru pada hari ini, Minggu (28/6). Juru bicara percepatan penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan data perkembangan Covid-19 dalam 24 jam terakhir sampai Minggu (28/6),

melaporkan ada tambahan sebanyak 1.027 pasien sembuh.

Dengan ini maka total pasien sembuh sebanyak 22.936. Penambahan pasien sembuh itu memecahkan rekor pada tiga hari lalu sebanyak 791.

Sedangkan kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 1.198. Dengan ini maka total kasus Covid-19 menjadi 54.010. Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 17.230 spesimen. Sehingga total spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 777.600.

"Kalau dilihat detail sebarannya maka yang terbanyak ada di Jatim sebanyak 330 kasus baru dan 101 sembuh, Sulsel 192 kasus baru dan 60 sembuh, Jakarta 125 kasus baru dan 225 sembuh, Kalsel 73 kasus baru dan 80 sembuh," ujar Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (28/6).

Dikatakan Yurianto, ada 20 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 9 provinsi lainnya tidak ada laporan kasus baru. Untuk pasien meninggal bertambah 34 sehingga menjadi 2.754.

Gugus tugas juga masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 47.658 dan pasien dalam pengawasan sebanyak 14.712.

Sementara itu, kasus positif Covid-19 di dunia telah menembus 10 juta kasus. Berdasarkan data terakhir yang dirilis worldometers.info, Sabtu (27/6) pukul 18.11 GMT atau Minggu dinihari pukul 01.11 WIB, jumlah kasus positif Covid-19 secara global tembus 10 juta kasus, atau tepatnya 10.000.051 kasus. Sedangkan jumlah kematian tercatat sebanyak 499.952 orang, dan jumlah pasien sembuh mencapai 5.414.646 kasus. (b1)

Bawaslu: Ada Empat Syarat Utama Pilkada Sukses 2020

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan optimistis pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan sukses. Namun, ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

"Pertama, kepastian kerangka hukum harus kuat sebelum memulai tahapan. Artinya hukum sudah kuat dan bisa menjadi legitimasi bagi pelaksanaan lanjutan Pilkada 2020," kata Abhan di Jakarta, Sabtu (27/6).



Abhan

Abhan mengakui, komisi pemilihan umum (KPU) sudah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. KPU dan Bawaslu juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait petunjuk teknis atas PKPU yang ada.

Dasar hukum lainnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dengan berbagai peraturan yang ada diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada.

Kedua, kesiapan teknis yang harus disiapkan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu sampai jajaran terbawah. Terlebih verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sudah dilakukan mulai Rabu, 24 Juni 2020. Artinya Bawaslu perlu melakukan pengawasan melekat

terhadap KPU.

"Pengawasan verifikasi faktual ini penting untuk memastikan bakal calon ini memenuhi syarat atau tidak karena ini bisa menjadi keputusan KPU sehingga kita mempunyai peran besar," ujar Abhan.

Ketiga, adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Abhan, Bawaslu melihat soal anggaran menjadi krusial karena jika susah untuk diturunkan maka tahapan juga bisa terhambat, terlebih untuk pembelian alat-alat pelindung dari Covid-19.

Keempat, kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol pencegahan Covid 19 yang ketat. Bukan hanya peserta pemilihan, penyelenggara, pe-

merintah tetapi juga masyarakat luas. Terlebih akan ada tahapan Pilkada yang mengharuskan adanya pertemuan langsung.

Sementara, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengemukakan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tak lantas mendeligitimasi pelaksanaan pesta demokrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Syaratnya adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Masalah itu telah diakomodir dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

"Protokol kesehatan merupakan prasyarat yang ditegaskan dalam Surat Gugus Tugas Nomor B-196/2020 dan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada 27 Mei 2020. Protokol kesehatan mengatur dua hal pokok, yakni prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan Pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan," kata Ubaid.

Menurut Ubaid, substansi PKPU terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas dan Kemenkes serta telah melalui proses harmonisasi dengan Kemenkumham pada 23 Juni dan 25 Juni 2020. PKPU tersebut tinggal menunggu proses pengundangan oleh Kemenkumham. (b1)

Pendidikan Aset Terbesar Bangsa RI

JAKARTA - Pada masa pandemi saat ini, pendidikan menjadi aset terbesar bangsa Indonesia yang harus dikembangkan selain sumber daya alam (SDA) dan sumber kapital. Melalui pendidikan, Indonesia akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Apalagi pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi bakal mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu, usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, (di bawah usia 15 tahun dan di atas 64 tahun).

"Pendidikan adalah elemen sangat penting. Nomor satu. Aset paling penting yang kita miliki dan paling berharga di negeri kita bukanlah aset sumber daya alam maupun sumber daya kapital, tapi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing," kata Dewan

Pembina Purnomo Yusgiantoro pada pembukaan Webinar bertajuk "Reformasi Pendidikan Pasca-Pandemi Covid-19," di Jakarta, Sabtu (27/6).

Webinar yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-4 Purnomo Yusgiantoro Center menghadirkan pembicara, Praktisi pendidikan Arief Rachman, mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, dan Psikolog Elizabeth Santosa. Sebagai moderator Sekretaris PYC, Amelia Yusgiantoro.

Luky mengatakan, menghadapi bonus demografi, Indonesia harus mempersiapkan SDM usia produktif secara matang bagi terwujudnya SDM unggul, Indonesia maju.

Sebab, pada periode bonus demografi, penduduk usia produktif diprediksi akan men-

capai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Indonesia, lanjutnya, untuk dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, memerlukan ketersediaan SDM usia produktif melimpah yang diimbangi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, khususnya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Praktisi pendidikan Arief Rachman mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Memasuki era tatanan baru (*new normal*) peserta didik, orang tua, dan guru harus mempersiapkan diri secara matang.

"Guru dapat mengawasi secara berkala para siswa terkait penerapan pembelajaran fase normal baru di sekolah, serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan dalam fase transisi," kata dia. (nov)



Imbauan Protokol Kesehatan Covid-19

Petugas Satpol PP memberikan imbauan protokol kesehatan bagi warga yang berolah raga di kawasan Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/6/2020). Imbauan atau edukasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai penerapan protokol kesehatan yang menjadi prosedur tatanan normal baru di tempat kerumunan warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

